

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh :**

**TUGIYO SANYOTO**

**142180236**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program  
Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**TUGIYO SANYOTO**

**142180236**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
YOGYAKARTA**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**TUGIYO SANYOTO**  
**142180236**

**Telah disetujui dengan baik**  
**Yogyakarta , 11 April 2022**

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Sujatmika, M.Si.**  
**NIP. 19630305 199003 1 002**

**Dosen Pembimbing II**



**Dra. Sri Luna Murdianingrum, M.Si., Ak., CA**  
**NIP. 19651205 199303 2 002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta**



**Dr. Zuhrotun., S.E., M.Si., Ak.CA, CRP.**  
**NIPPPK 19740112 202121 2 002**

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2020**

Disusun oleh:

**TUGIYO SANYOTO**  
142180236


Telah dipresentasikan di depan penguji pada tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Susunan Dewan Penguji,

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Sujatmika, M.Si.**  
NIP. 19630305 199003 1 002


Dosen Pembimbing II

  
**Dra. Sri Luna Murdianingrum, M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19651205 199303 2 002

Dosen Penguji I

  
**Dr. Januar Eko Prasetyo, SE, M.Si, Akt.**  
NIP. 19720109 202121 1 003

Dosen Penguji II

  
**--Dr. H. Sutoyo, M.Si**  
NIP. 19620101 199103 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tugiyono Sanyoto  
No. Mahasiswa : 142180236  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 - 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar-benar asli karya tulis saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, Mei 2022  
Yang memberikan pernyataan,



METERAI  
TEMPEL  
10000  
XB92819811

( Tugiyono Sanyoto )

## ABSTRAK

Pemerintah daerah dalam menganalisis keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dan mengukur kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020.

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusumanegara No. 9 Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keserasian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio efisiensi belanja. Hasil Penelitian menunjukkan, kinerja keuangan pendapatan baik dengan rata-rata target realisasi pendapatan sebesar 116,51%. Kinerja keuangan belanja juga sudah cukup baik dilihat dari keserasian belanja yaitu rata-rata belanja operasi sebesar 91,91% dan belanja modal sebesar 0,76%. Efisiensi Belanja juga telah dilaksanakan terlihat dari realisasi anggaran belanja yang tidak melebihi pagu anggaran belanja sehingga mendapatkan SILPA surplus (sisa lebih perhitungan anggaran) dari efisiensi belanja.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan efisiensi yang berhubungan dengan PAD seperti Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Efisiensi akan meningkat dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.

Kata Kunci: Analisis Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

## ABSTRACT

*Local government in analyzing finances is to do financial ratio analysis. This financial ratio is then used as a benchmark to measure effectiveness in realizing local revenue, assessing local government financial independence and measuring financial performance from revenue growth. This study aims to determine the financial performance of the Department of Industry and Trade of the Yogyakarta Special Region in 2018-2020.*

*This research was conducted at the Office of Industry and Trade of the Special Region of Yogyakarta, which is located at Jl. Kusumanegara No. 9 Umbulharjo, Yogyakarta City. The data used is quantitative in the form of a Budget Realization Report (LRA). The method used is descriptive quantitative to measure financial performance with the ratio of compatibility, the ratio of the effectiveness of Regional Original Income (PAD) and the ratio of spending efficiency. The results of the study show that the financial performance of income is good with an average income realization target of 116.51%. The financial performance of spending is also quite good, seen from the harmony of spending, namely the average operating expenditure of 91.91% and capital expenditure of 0.76%. Expenditure efficiency has also been implemented, as can be seen from the realization of the expenditure budget which does not exceed the budget ceiling so that the SILPA surplus (the remainder of the budget calculation) is obtained from the efficiency of expenditure.*

*The Department of Industry and Trade of the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta is expected to increase Regional Original Income by increasing efficiency related to PAD, such as Levy for the Use of Regional Wealth and Retribution for Sales of Regional Business Production. Efficiency will increase by carrying out proper and sustainable supervision and control to avoid deviations in PAD acquisition by the person concerned.*

*Keywords: Financial Performance Analysis, Financial Ratio*

## MOTO

“Apa apa yang benar diperhitungkan adalah akhir  
yang baik, bukan awal yang buruk”

Ibnu Taimiyah



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-2020”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Yogyakarta. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran, dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun disadari karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. M. Irhas Effendi, M.Si selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sujatmika, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sujatmika, M.Si. dan Ibu Sri Luna Murdianingrum, Dra., M.Si., Ak., CA selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan berbagai pengalaman kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
4. Tak lupa juga buat Istri dan anak-anaku yang selalu memberikan semangat buatku.

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 S1 yang selalu menjalin semangat tinggi dalam ikatan mahasiswa akuntansi.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Harapan saya skripsi ini semoga dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta serta para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,

Penulis

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-2020”. Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Ibunda, Istri dan anak-anaku tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan terbaik.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dalam menempuh pendidikan.
4. Teman-teman Jurusan Akuntansi Kelas Pemda angkatan 2018 yang memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Batasan Penelitian .....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	6
1.6. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	33
2.3 Rerangka Konseptual .....	36
BAB III METODA PENELITIAN .....	37
3.1 Rancangan Penelitian .....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.4 Prosedur Pengambilan Data .....	38
3.5 Model dan Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42

4.1	Deskripsi Data.....	42
4.2	Hasil Pembahasan .....	64
BAB V PENUTUP .....		87
5.1	Simpulan .....	87
5.2	Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....		92
<b>LAMPIRAN</b> .....		94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Analisis kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan (Halim: 2007: 150).

Perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia sudah mengalami kemajuan yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimulai diterapkan ditahun 2015 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan adalah berbasis akrual dan telah mempunyai landasan hukum. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akurual maka akan memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah dan menjanjikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparasi keuangan pemerintah dalam pemerintahan.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan Republik

Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparansi dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas Otonomi Daerah (OTDA) tersebut sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sehingga bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD

dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otoda sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otonomi daerah yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain Pramono (2014) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2010, 2011 sudah efektif, efisien dan mengalami pertumbuhan positif serta memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman. Namun demikian, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Depok masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya.

Mariani (2013) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah efisien walaupun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam



pembangunan daerah semakin meningkat. Sedangkan Azhar (2010) memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum dan sesudah otonomi mengalami penurunan atau mengarah ke arah yang lebih buruk.

Machmud, Kawung dan Rompas (2014) dalam penelitiannya, menemukan bahwa hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil serta tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara Bisma dan Susanto (2010) dalam penelitiannya, menemukan bahwa hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 tidak optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara lain; ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien. Menurut Puspitasari (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2007-2011 sudah efektif, efisien dan pertumbuhan pendapatan meningkat. Namun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Malang masih rendah dan sebagian besar dana masih digunakan untuk belanja rutin. Menurut Afriyanto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 juga menemukan hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu rata-rata sudah efektif, efisien dan mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi tingkat kemandirian masih sangat rendah dan

sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk belanja rutin dari pada belanja modal.

Salah satu tujuan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan atau penurunan. Tetapi secara umum, fenomena yang terjadi adalah kinerja keuangan daerah masih belum stabil serta belum efektif dan efisien. Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Adapun salah satu permasalahan yang sering dialami dinas pemerintahan adalah mengenai permasalahan keuangan. Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 9 Umbulharjo, Kota Yogyakarta”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sampai dengan 2020”.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Setiap pelaksanaan pekerjaan sudah selayaknya mempunyai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sampai dengan 2020.

## 1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan – batasan masalah antara lain:

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2018 – 2020.
- b. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang ditinjau dari aspek keuangan yang meliputi analisis Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian yang dilakukan

ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada aspek teoritis yaitu bagi perguruan tinggi, peneliti, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk melakukan kajian serta penelitian lebih lanjut.
- b. Hasil penelitian juga diharapkan pada aspek praktis yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi organisasi perangkat daerah untuk mengetahui dan melihat hasil kinerja keuangan yang dicapai dan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses pembuatan dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
BAB III	METODA PENELITIAN
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### A. Keuangan Daerah

##### 1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah yang meliputi seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah, ia juga menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membelanjai belanja (Nurul dan Ahmad, 2011).

Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Abdul Halim, Akuntansi pemerintahan/ keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi yang didalamnya terdapat akuntansi keuangan daerah yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintahan daerah.

Jadi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan, evaluasi keuangan dan segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah.

## 2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi (mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya masukan (*input resources*) seminimal mungkin), efisiensi mengukur sejauh mana pemerintah dapat mencapai keluaran optimal dengan sumber daya masukan seminimal mungkin (*output/input*), efektivitas (mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target yang ditetapkan), transparan, dan akuntabel. Menurut Mahmudi, Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya terdiri dari tiga tahap yaitu:

### a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi *input*, proses, dan *output*-nya. *Input* dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang dimiliki pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan *output*

perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 4) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- 5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
- 6) Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 7) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dokumen perencanaan daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan.
- 2) Dokumen perencanaan keuangan daerah berupa Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, serta RAPBD.

Output dari tahap perencanaan ini adalah berupa RAPBD. Mengapa RAPBD yang menjadi output utama dalam perencanaan, karena bagi pemerintah daerah APBD merupakan tulang punggung pembangunan daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakukan distribusi, alokasi, dan stabilisasi keuangan di daerah. Oleh karena itu, RAPBD menjadi sangat penting bagi daerah, arah

dan orientasi pembangunan daerah dapat tergambar di RAPBD tersebut.

Sebelum menjadi RAPBD, terdapat proses yang harus dilalui yaitu proses perencanaan anggaran. Proses perencanaan anggaran terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan perencanaan dari atas (*top down*) dan partisipatif (*bottom up*). Pendekatan *top down* adalah berupa penentuan Kebijakan Umum APBD serta penetapan prioritas dan plafon anggaran. Sedangkan perencanaan *bottom up* adalah berupa usulan program, kegiatan, dan anggaran dari masing-masing unit kerja (SKPD).

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja, proses penyusunan anggaran dilakukan melalui pengisian formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh setiap satuan kerja yang ada di pemerintah daerah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk setiap kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut kemudian direkapitulasi sehingga menghasilkan RAPBD SKPD. RAPBD SKPD tersebut akan dievaluasi dan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kompilasi dari seluruh RKA SKPD akan menjadi RAPBD yang nantinya segera disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD.



b. Tahap Pelaksana atau Implementasi

Output dari tahap perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Output perencanaan tersebut akan menjadi input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusnya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang direncanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan ketidakakuratan laporan keuangan. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan *output* dari tahap pelaksanaan.

c. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

*Output* dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi *input* bagi tahap pelaporan. *Input* tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan memacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan

daerah siap untuk diaudit oleh auditor independen, selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

## B. Anggaran

### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Menurut Mahmudi, Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakn oleh organisasi pemerintah daerah berdasarkan mandat yang diberikan oleh para *stakeholder* pemerintah daerah.

Anggaran adalah pernyataan-pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang datang. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Jadi anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah disusun.

## 2. Fungsi Anggaran

Anggaran sektor publik/pemerintah mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

### a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

### b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana

detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
  - 2) Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavourable variances*)
  - 3) Menemukan penyebab dan dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
  - 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- d. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dari kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*Political tool*). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik, manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

g. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan sifatnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/ DPRD. Masyarakat LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses

penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tunawisma, dan kelompok lain yang tak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme dan sebagainya.

### C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

#### 1. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan

untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD berisi tentang daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. APBD merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan APBD menurut pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas



beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

## 2. Tahapan Penyusunan Anggaran

Tahapan penyusunan anggaran pembangunan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi, Biro Keuangan dan Biro penyusunan program, untuk mengetahui perkiraan penerimaan/pendapatan daerah untuk tahun yang akan datang.
- b. Mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas Propinsi, biro-biro di Sekretariat Wilayah, kantor-kantor dan badan-badan lainnya, yang terkait dengan penyusunan anggaran pembangunan, untuk memberikan penjelasan penyusunan anggaran pembangunan.
- c. Meneliti dan membahas DUPDA bersama biro penyusunan Program Setwilda setra Biro Keuangan Setwilda serta instansi yang bersangkutan.
- d. Mengadakan pertemuan antar bidang di Bappeda bersama ketua Bappeda Propinsi untuk penyaringan DUPDA yang didasarkan tersedianya dana anggaran pembangunan di tahun mendatang dan skala prioritas yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- e. Disusun Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Tim Anggaran yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas.

- f. Di DPRD, RAPBD akan dibahas bersama-sama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Tim Anggaran Legislatif.
- g. Setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, maka RAPBD dapat disahkan menjadi APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
- h. Pelaksanaan APBD menunggu pengesahan dari pejabat yang berwenang.

### 3. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Perubahan anggaran pendapatan belanja daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja.

Peraturan daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, disertai dokumen- dokumen pendukungnya kepada DPRD, pengambilan keputusan tentang perubahan APBD tersebut dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir).

### 4. Klasifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Adapun struktur anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari bagian yaitu:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a) Pendapatan pajak daerah
- b) Pendapatan pajak daerah
- c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a) Dana bagi hasil pajak

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- (1) Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan

(2) Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan.

(3) Pajak penghasilan pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri

b) Dana bagi hasil bukan pajak (SDA)

c) Dana alokasi umum

d) Dana alokasi khusus

### 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

a) Pendapatan hibah

b) Pendapatan lainnya.

### b. Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

#### 1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi: belanja

pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan.

#### 2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.

#### 3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah.

#### 4) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi hasil lainnya.

#### c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Penerimaan Daerah

- a) Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran
- b) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- c) Penerimaan kembali pinjaman pegawai
- d) Penerimaan piutang daerah
- e) Penarikan investasi

2) Pengeluaran Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/BUMD) dan atau milik swasta, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan atau dapat dialihkan kepada BUMD.

**5. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam

satu periode pelaporan.

Menurut Abdul Halim, Hal-hal yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran, mencakup 3 (tiga) unsur pokok antara lain:

a. Pendapatan

Semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Belanja

Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam evaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintahan pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyaji laporan secara komparatif.
- d. Menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat; telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### D. Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai



hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Wibowo: 2011).

Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personelnnya, berdasarkan sasaran strategik, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Jadi kinerja merupakan hasil karya nyata dari seseorang atau perusahaan yang dapat dilihat, dihitung jumlahnya, dan dapat dicatat waktu perolehannya. Analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi

melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah antara lain dengan cara analisis rasio keuangan yaitu

- a. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

- b. Rasio efektivitas pajak daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas

pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

## 2. Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah antara lain dengan cara:

### a. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

### b. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya standar pengukuran belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen.

c. Analisis belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya, standar pengukuran belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen.

d. Analisis belanja langsung dan tidak langsung terhadap total

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Belanja langsung dapat dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat dan efisiensi anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio belanja langsung dan tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} \\ &= \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

e. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Yuliana (2013) meneliti tentang *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ditinjau dari Rasio Keuangan di Kabupaten Sragen*. Peneliti menganalisis kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode 2010-2012. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kinerja dalam bentuk rasio keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tahun 2010-2012 sudah baik, tapi penelitian ini tidak menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga tidak dapat memperoleh hasil analisis yang lengkap, perhitungan penelitian ini hanya difokuskan empat model analisis rasio keuangan sehingga tidak didapat hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.

Bahrin Assidiqi (2014) meneliti tentang *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode 2008-2012. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dan belanja daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Sedangkan dilihat dari Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

Ibrah Mayu Putra (2015) meneliti tentang *Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2010-2014*. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2014. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat tinggi terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat, provinsi dan lainnya sehingga tingkat kemandirian daerah rendah sekali. Efektifitas pendapatan asli daerah dengan rata-rata rasio efektifitas PAD Pemerintah

Kota Bukittinggi mencapai kategori efektif. Efisiensi pendapatan asli daerah dengan rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Kota Bukittinggi mencapai sangat efisien. Pertumbuhan pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

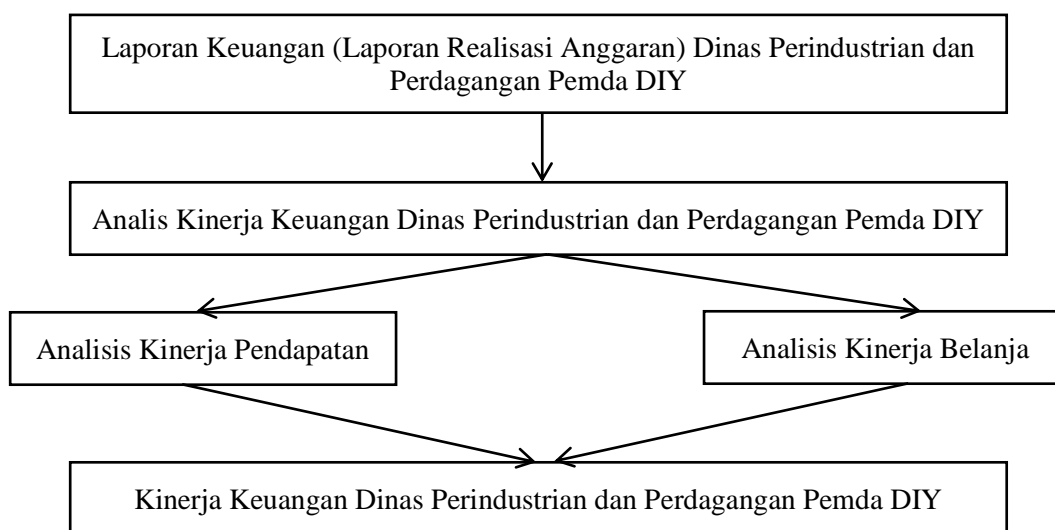
Defvi Martha (2015) meneliti tentang *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar*. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2014. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis rasio keuangan berupa analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan tahun 2012-2014 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Sedangkan dilihat dari analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2012- 2014 sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

Beda penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek dan periode penelitian serta ada beberapa indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini maka penulis akan



melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-2020.

### 2.3 Rerangka Konseptual



Gambar 2.1. Rerangka Konseptual

## BAB III

### METODA PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode tersebut dapat memberikan gambaran terhadap data-data keuangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang penulis teliti, kemudian penulis akan mengolahnya dengan menggunakan alat analisis tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehingga penulis dapat mengetahui seberapa besar kinerja pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media

lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Data sekunder yang digunakan yaitu data-data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan keuangan yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober - Desember 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengambilan data yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

### 3.4 Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari pemerintah daerah berupa data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2020 dan data lainnya yang terkait dengan penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3.5 Model dan Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah Analisis rasio keuangan yaitu analisis data yang digunakan dalam menjelaskan hubungan

dari data keuangan seperti membandingkan data yang satu dengan yang lain. Analisis rasio keuangan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

A. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim, 2002

Standar pengukuran efektivitas adalah:

Tabel 3.1  
Skala Interval Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: I Dewa Gde Bisma dkk, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, (Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4 No. 3 Desember 2010), Hal. 78.

B. Analisis Keserasian Belanja

1) Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim, 2002

Pada umumnya proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

## 2) Analisis belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim, 2002

Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah, yaitu antara 5-20%.

## 3) Analisis belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Pada umumnya proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

## C. Rasio efisiensi belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim, 2002

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Standar pengukuran efisiensi adalah:

Tabel 3.2.  
Skala Interval Efisiensi

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
Di bawah 60%	Sangat Efisiensi

Sumber: I Dewa Gde Bisma dkk, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, (Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4 No. 3 Desember 2010), Hal. 79.

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

##### A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jl. Kusumanegara No. 9, Yogyakarta, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2017-2022 adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada misi gubernur DIY, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban”.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;

4. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
5. peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
6. fasilitasi infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri;
7. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
8. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
9. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
10. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
11. penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya;
12. pengawasan distribusi bahan berbahaya;
13. penerbitan Surat Keterangan Asal dan fasilitasi Angka Pengenal Impor;
14. pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
15. pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
16. fasilitasi pengembangan dan promosi produk ekspor;
17. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
18. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
19. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;



20. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota;
21. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
22. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

B. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Susunan Organisasi terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum.
3. Bidang Industri Agro, terdiri dari :
  - a. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar;
  - b. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
4. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri dari
  - a. Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka;
  - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika.

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
    - a. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
    - b. Seksi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga.
  6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
    - a. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
    - b. Seksi Pengembangan Ekspor; dan
  7. Unit Pelaksana Teknis
  8. Jabatan Fungsional.
- C. Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

- i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran;
- k. penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- l. penyelenggaraan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- m. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- n. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- o. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Sekretariat terdiri atas: Subbagian Program, Subbagian Keuangan; dan Subbagian Umum.

1) Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja Subbagian Program;

- b) penyusunan rencana program Dinas;
- c) penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d) pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang perindustrian dan perdagangan;
- e) penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang perindustrian dan perdagangan;
- f) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

2) Subbagian keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b) pengelolaan keuangan Dinas;
- c) pengelolaan pendapatan Dinas;
- d) pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- e) pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
- f) penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;

- g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

## 2. Bidang Industri Agro

Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri agro untuk meningkatkan nilai produksi IKM.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Industri Agro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Industri Agro;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang industri agro;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri agro;
- d. fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri agro;
- e. promosi produk industri agro;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pembinaan dan pengembangan industri kreatif agro;
- h. pembinaan dan pengawasan industri kecil, industri menengah, dan industri besar agro di wilayah DIY;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan pengembangan industri kecil, menengah, industri besar agro lintas Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
- k. penyusunan laporan program Bidang Industri Agro; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bidang Industri Agro terdiri atas Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar; dan Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

- 1) Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar.

Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar. Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar;
- b) penyiapan bahan rekomendasi teknis dan non teknis industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- c) fasilitasi penyediaan informasi potensi industri dan skala prioritas penggunaan yang dibutuhkan industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;

- d) koordinasi dan fasilitasi pengembangan industri hijau (makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar) skala provinsi;
- e) fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses bahan baku, pengembangan klaster dan sentra, dan teknologi pendukung pengembangan industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- f) penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi dibidang industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- g) fasilitasi promosi, informasi pasar, dan pemasaran produk industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- h) pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- i) koordinasi dan fasilitasi penerapan sertifikasi standardisasi dan sertifikasi produk di bidang industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;
- j) koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar sektor, lintas sektor, dan lintas daerah di bidang industri makanan, minuman, tembakau, hasil laut, perikanan, dan bahan penyegar;

- k) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

2) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri hasil hutan dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a) Apenyusunan program kerja Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- b) penyiapan fasilitasi kebijakan teknis industri hasil hutan dan perkebunan;
- c) penyiapan bahan rekomendasi teknis dan non teknis industri hasil hutan dan perkebunan;
- d) fasilitasi penyediaan informasi potensi industri dan skala prioritas penggunaan yang dibutuhkan industri hasil hutan dan perkebunan;
- e) koordinasi dan fasilitasi pengembangan industri hijau;
- f) fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses bahan baku, pengembangan klaster dan sentra, dan teknologi pendukung pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;



- g) penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- h) fasilitasi promosi, informasi pasar, dan pemasaran produk industri hasil hutan dan perkebunan;
- i) pembinaan dan pengembangan industri kreatif hasil hutan dan perkebunan;
- j) koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis produksi dan manajemen mutu di bidang produksi dan standardisasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- k) koordinasi dan fasilitasi penerapan sertifikasi standardisasi dan sertifikasi produk di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- l) koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar sektor, lintas sektor, dan lintas daerah di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- m) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

### 3. Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka

Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri logam, sandang, dan aneka untuk meningkatkan nilai produksi IKM. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang industri logam, sandang, dan aneka;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri logam, sandang, dan aneka;
- d. fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
- e. promosi produk industri logam, sandang, dan aneka;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif logam, sandang, dan aneka;
- h. pembinaan dan pengawasan bagi industri kecil, industri menengah, dan industri besar logam, sandang, dan aneka;
- i. koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan pengembangan industri kecil, menengah, industri besar logam, sandang, dan aneka lintas Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka terdiri atas Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka; Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika.

- 1) Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka

Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka;
- b) penyiapan bahan rekomendasi teknis dan non teknis industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- c) fasilitasi penyediaan informasi potensi industri dan skala prioritas penggunaan yang dibutuhkan industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- d) koordinasi dan fasilitasi pengembangan industri hijau (kimia, tekstil, kulit, dan aneka) skala provinsi;
- e) fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses bahan baku, pengembangan klaster dan sentra, dan teknologi pendukung pengembangan industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- f) penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi di bidang industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- g) fasilitasi promosi, informasi pasar dan pemasaran produk industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- h) pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- i) koordinasi dan fasilitasi penerapan sertifikasi standardisasi dan sertifikasi produk di bidang industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;

- j) koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar sektor, lintas sektor dan lintas daerah di bidang industri kimia, tekstil, kulit, dan aneka;
- k) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri logam, mesin, elektronika, dan telematika. Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika;
- b) penyiapan bahan rekomendasi teknis dan non teknis industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- c) fasilitasi penyediaan informasi potensi industri, dan skala prioritas penggunaan yang dibutuhkan industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- d) koordinasi dan fasilitasi pengembangan industri hijau (logam, mesin, elektronika, dan telematika) skala provinsi;
- e) fasilitasi dan koordinasi kelembagaan, infrastruktur, akses bahan baku, pengembangan klaster dan sentra, dan teknologi pendukung pengembangan industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;

- f) penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- g) fasilitasi promosi, informasi pasar dan pemasaran produk industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- h) pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- i) koordinasi dan fasilitasi penerapan sertifikasi standardisasi dan sertifikasi produk di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- j) koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar sektor, lintas sektor dan lintas daerah di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan telematika;
- k) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### 4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan jumlah omset usaha pelaku perdagangan yang dibina dan mengendalikan persentase jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar. Untuk melaksanakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyusun program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri;

- b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- c. pengkajian dan pemeriksaan usaha perdagangan bahan berbahaya;
- d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri;
- e. pemantauan, pengelolaan data, dan fasilitasi pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
- f. pemasaran dan promosi produk;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pengembangan dan penggunaan produksi dalam negeri;
- i. pembinaan di bidang kelembagaan, kemitraan dan usaha perdagangan;
- j. pemantauan dan sosialisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. kerjasama dengan mitra kerja bidang perdagangan;
- l. fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen dan pembinaan pemberdayaan konsumen;
- m. pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
- n. pengawasan serta penyidikan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas: Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri; dan Seksi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga.

1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan usaha perdagangan dalam negeri. Untuk melaksanakan Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
- b) penyiapan bahan rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam negeri;
- c) pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pengelolaan data pertumbuhan dan pengembangan sarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
- d) pembinaan, fasilitasi, dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- e) pembinaan kelembagaan kemitraan, dan usaha perdagangan;
- f) pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi;
- g) pemasaran dan promosi produk;

- h) kerja sama dengan mitra kerja di bidang sarana dan usaha perdagangan dalam negeri;
  - i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri; dan
  - j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- 2) Seksi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Seksi Seksi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Untuk melaksanakan tugas Seksi Seksi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;
- b) pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelayanan di bidang mutu barang serta pengujian mutu barang;
- c) pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga;
- d) penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan perdagangan;
- e) diseminasi, fasilitasi, koordinasi, dan pemberdayaan konsumen serta penanganan sengketa konsumen;



- f) pengawasan bahan berbahaya;
- g) Pemantauan dan pengelolaan data perkembangan kebutuhan, persediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h) fasilitasi, koordinasi, dan stabilisasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i) pelaksanaan kerja sama dengan mitra di bidang stabilisasi harga barang pokok dan barang penting;
- j) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### 5. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan nilai ekspor perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perdagangan luar negeri;
- c. fasilitasi ekspor impor;
- d. pengelolaan data dan informasi ekspor impor;

- e. analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor dan tujuan ekspor potensial;
- f. pelaksanaan hubungan kerja sama dan temu bisnis perdagangan luar negeri;
- g. pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri atas: Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan Seksi Pengembangan Ekspor.

1) Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor

Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi ekspor dan impor. Untuk melaksanakan tugas Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
- b) fasilitasi koordinasi dan pembinaan ekspor;
- c) penyiapan rekomendasi perizinan ekspor;
- d) penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan dan non perizinan ekspor dan impor;
- e) pembinaan terhadap pemilik Angka Pengenal Impor;
- f) penyiapan rekomendasi terhadap importasi /pemasukan barang;

- g) fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal barang;
- h) pengelolaan data ekspor dan impor DIY;
- i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

## 2) Seksi Pengembangan Ekspor

Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ekspor. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Ekspor;
- b) pelaksanaan analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor DIY dan tujuan ekspor potensial;
- c) pelaksanaan hubungan kerjasama dan temu bisnis perdagangan luar negeri;
- d) pembinaan mutu barang ekspor;
- e) fasilitasi pengembangan promosi produk ekspor dan potensi ekspor;
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Ekspor; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- h) rikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri

Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi hubungan perdagangan luar negeri, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja;
- b) penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi hubungan perdagangan luar negeri;
- c) pelaksanaan petunjuk teknis fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan hubungan perdagangan luar negeri;
- d) sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri;
- e) analisis potensi dan evaluasi kinerja hubungan perdagangan luar negeri;
- f) fasilitasi upaya kerjasama dan temu bisnis perdagangan luar negeri;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri; dan

### 6. Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi,

susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### 4.2 Hasil Pembahasan

##### A. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 4.1  
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Anggaran/ Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD
2018	193.395.496	162.500.000	119,01%
2019	200.416.692	180.400.000	111,09%
2020	217.581.035	182.200.000	119,42%
Rata-Rata			116,51%

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Pada tahun 2018 rasio efektivitas PAD sebesar 119,01% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 rasio efektivitas PAD sebesar 111,09% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 rasio efektivitas PAD sebesar 119,42% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata ketiga tahun tersebut yang mencapai 116,51%, karena tingkat rasio efektivitas PAD berada di atas 100% dilihat berdasarkan skala pengukuran, maka kinerjanya dikatakan sangat efektif. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan baik jika dinilai dari rasio efektivitas PAD.

Tabel 4.2  
Skala Interval Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Efektivitas PAD dinilai dari perbandingan realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD. Untuk hasil efektivitas PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat selama tahun 2018-2020 yaitu sangat efektif. Analisis kinerja menunjukkan bahwa efektivitas dinilai sangat perlu dalam segala bidang pekerjaan, organisasi, swasta atau pemerintahan. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa kinerja anggaran pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan tahun 2018-2020 telah mencapai target yang telah dianggarkan.

#### B. Analisis Keserasian Belanja

##### 1) Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3  
Belanja Operasi terhadap Total Belanja  
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase Rasio
2018	19.456.179.873	21.186.947.323	91,83%
2019	20.712.643.012	22.480.135.936	92,14%
2020	16.787.984.617	18.297.649.150	91,75%
Rata-Rata			91,91%

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel perhitungan di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja operasi dari total belanja daerah pada tahun 2018 sebesar 91,83%. Pada tahun 2019 sebesar 92,14% terjadi peningkatan sebesar 0,31%. Pada tahun 2020 sebesar 91,75% terjadi penurunan sebesar 0,39%. Standar pengukurannya berada pada skala 60-90%. Secara rata-rata belanja operasi terhadap total belanja daerah sebesar 91,91%, ini dikatakan bahwa belanja operasi sudah mencapai skala yang ditentukan. Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih besar dialokasikan untuk belanja operasi seperti: belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

2) Analisis belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$



Tabel 4.4  
Belanja Modal terhadap Total Belanja  
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase Rasio
2018	133.535.472	21.186.947.323	0,63%
2019	246.840.000	22.480.135.936	1,10%
2020	102.409.750	18.297.649.150	0,56%
Rata-Rata			0,76%

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel perhitungan di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2018 sebesar 0,63%. Pada tahun 2019 sebesar 1,10% terjadi peningkatan sebesar 0,47%. Pada tahun 2020 sebesar 0,56% terjadi penurunan sebesar 0,54%. Standar pengukurannya berada pada skala 5-20%. Secara rata-rata belanja modal terhadap total belanja sebesar 0,76%, ini dikatakan bahwa belanja modal belum mencapai skala yang ditentukan. Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih kecil dialokasikan untuk belanja modal seperti: belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer, belanja modal pengadaan alat-alat studio, belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan.

3) Analisis belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total belanja langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.5  
Belanja Langsung terhadap Total Belanja  
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase Rasio
2018	11.859.051.009	21.186.947.323	55,97%
2019	13.507.365.558	22.480.135.936	60,08%
2020	8.917.398.841	18.297.649.150	48,73%
Rata-Rata			54,93%

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari perhitungan di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2018-2020 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung. Persentase belanja langsung terhadap total belanja pada tahun 2018 sebesar 55,97%. Pada tahun 2019 sebesar 60,08% terjadi peningkatan sebesar 4,11%. Pada tahun 2020 sebesar 48,73% terjadi penurunan sebesar 11,35%. Secara rata-rata persentase belanja langsung terhadap total belanja sebesar 54,93% tidak mencapai standar pengukuran yaitu 60-90%.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih besar dialokasikan untuk belanja langsung yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total belanja tidak langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.6  
Belanja Langsung terhadap Total Belanja  
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase Rasio
2018	7.730.664.336	21.186.947.323	36,49%
2019	7.452.117.454	22.480.135.936	33,15%
2020	7.815.281.669	18.297.649.150	42,72%
Rata-Rata			37,45%

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari perhitungan di atas persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja pada tahun 2018 sebesar 36,49%. Pada tahun 2019 sebesar 33,15% terjadi penurunan sebesar 3,34%. Pada tahun 2020 sebesar 42,72% terjadi peningkatan sebesar 9,57%. Secara rata-rata persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja sebesar 37,45%, ini tidak mencapai standar pengukuran yaitu 60-90%.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih kecil dialokasikan untuk belanja tidak langsung seperti: belanja pegawai.

### C. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.7  
Efisiensi Belanja  
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja
2018	19.589.715.345	21.186.947.323	92,46%
2019	20.959.483.012	22.480.135.936	93,23%
2020	16.732.680.510	18.297.649.150	91,45%
Rata-Rata			92,38%

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari perhitungan di atas rasio efisiensi belanja dari realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2018 sebesar 92,46%. Pada tahun 2019 sebesar 93,23% terjadi peningkatan sebesar 0,77%. Pada tahun 2020 sebesar 91,45% terjadi penurunan sebesar 1,78%. Dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan kurang efisiensi dalam melakukan realisasi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi dari tahun 2018-2020 berada di antara 90%-100%.

Tabel 4.8  
Skala Interval Efisiensi

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Tidak Efisiensi
90%-100%	Kurang Efisiensi
80%-90%	Cukup Efisiensi
60%-80%	Efisiensi
Di bawah 60%	Sangat Efisiensi

Analisis kinerja perhitungan rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memakai perhitungan realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja, berarti pemerintah melakukan sedikit penghematan anggaran dari total yang dianggarkan itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi dengan hasil ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mendapatkan SILPA surplus (sisa lebih perhitungan anggaran) dari efisiensi belanja.

Berdasarkan beberapa analisis di atas menunjukkan bahwa analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis laksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

##### a. Kinerja Keuangan Pendapatan

Hasil Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat dikatakan baik. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari Varians Pendapatan Daerah selama Tahun 2018-2020, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 116,51%.

##### b. Kinerja Keuangan Belanja

Hasil Kinerja Keuangan Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2020 sudah cukup baik, dikarenakan realisasi belanja yang tidak melebihi pagu anggaran belanja sehingga mendapatkan SILPA surplus. Kinerja Keuangan Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2020 dilihat dari Keserasian Belanja secara umum terlihat bahwa sebagian besar

anggaran belanja dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2018-2020 rata-rata Belanja Operasi sebesar 91,91% sedangkan Belanja Modal sebesar 0,76%. Dan total belanja lebih kecil dialokasikan untuk belanja tidak langsung dengan rata-rata 37,45%, sedangkan untuk belanja langsung lebih besar dengan rata-rata 54,93%.

c. Efisiensi Belanja

Kinerja Keuangan Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari Efisiensi Belanja telah melakukan efisiensi belanja. Realisasi anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melebihi pagu anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. mendapatkan SILPA surplus (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari efisiensi belanja.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang

berhubungan dengan PAD seperti Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Efisiensi akan meningkat dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dari itu perlu menggali lebih lagi guna mencari beberapa potensi untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2018-2020. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : AMP YKPN,
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Afriyanto & Astuti, W. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi SI Akuntansi*, 1 (1).
- Azhar, M. K. S. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. *Jurnal Keuangan & Bisnis*, 2 (15), Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan.
- Bisma, I., D., G., & H. Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. *Jurnal GeneC Swara Edisi Khusus*, 4 (3), 75-86.
- Erlina, Dkk. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Ibnu Syamsi. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- I Dewa Gde Bisma dkk, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007, (*Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus*, Vol. 4 No. 3 Desember 2010), Hal. 78.
- Machmud, M., G. Kawung, & W. Rompas. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 14 (2), 1-13.

- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohammad Mahsun. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1 (2).
- Marsono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif: Langkah-Langkah Menyusun Skripsi, Tesis atau Disertai Menggunakan Teknik Analisis Jalur. Bogor: In Media.
- Pramono, Joko. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7 (13).
- Puspitasari, A. F. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1 (2), 1-22.
- S. Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Mithods). Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

## LAMPIRAN





### Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi









#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TUGIYO SANYOTO  
 No. Mahasiswa : 142180236  
 Alamat di Yogyakarta : Berjo Kidul, Sidoluhur, Godean, Sleman  
 Telp. : 081227210052  
 Semester mulai skripsi : 8  
 Judul skripsi : Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Perindustrian dan  
 Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-  
 2020

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sujatmika, M.Si.
2. Dra. Sri Luna Murdianingrum, M.Si., Ak., CA

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda tangan
1	24 September 2021	Koordinasi bimbingan skripsi lewat zoom mengajukan judul untuk proposal	
2	8 November 2021	Mengirimkan proposal skripsi lewat email ke dosbing 1, koreksinya Judul dan perbaikan beberapa kalimat yang tidak sesuai	
3	9 November 2021	Mengirimkan Proposal ke dosbing 1, ada beberapa koreksi terutama pada kalimat dan beberapa paragraf yang tidak sesuai	
4	11 Januari 2022	Mengirimkan koreksi proposal skripsi lewat email kepada dosbing 1 dan diarahkan untuk dikirim ke dosbing 2	

5	12 Januari 2022	Mengirimkan koreksi proposal skripsi lewat email kepada dosbing 2, ada beberapa koreksi terutama pada rumusan masalah, penggantian jurusan menjadi program studi, dan kemudian mencari data	
6	14 Maret 2022	Konsultasi luring ke dosbing 2, perbaikan beberapa paragraf dan penambahan fenomena ,dan lanjut ke bab IV	
7	16 Maret 2022	Mengirim koreksian proposal bab 1-4 lewat email/online ke dosbing 1 dan selanjutnya di suruh kirim ke dosbing 2	
8	24 Maret 2022	Koreksi dalam penambahan Daftar Isi, Abstrak kesimpulan dan saran secara luring (Dosbing 2)	
9	11 April 2022	Tanda tangan lembar pengesahan Konsultasi jurnal dosbing 1/luring	
10	11 April 2022	Tanda tangan lembar pengesahan Konsultasi jurnal dosbing 2/luring	
11	14 April 2022	Konsultasi Jurnal dan tanda tangan kartu bimbingan skripsi dosbing 1	
12	14 April 2022	Konsultasi Jurnal dan tanda tangan kartu bimbingan skripsi dosbing 2	

## Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**SKPD : 2.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018**

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>162.500.000,00</b>	<b>193.395.496,00</b>	<b>30.895.496,00</b>	<b>119,01</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>162.500.000,00</b>	<b>193.395.496,00</b>	<b>30.895.496,00</b>	<b>119,01</b>
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	173.395.496,00	23.395.496,00	115,60
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.500.000,00	20.000.000,00	7.500.000,00	160,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>21.186.947.323,00</b>	<b>19.589.715.345,00</b>	<b>(1.597.231.978,00)</b>	<b>92,46</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>8.540.394.323,00</b>	<b>7.730.664.336,00</b>	<b>(809.729.987,00)</b>	<b>90,52</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	8.540.394.323,00	7.730.664.336,00	(809.729.987,00)	90,52
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>12.646.553.000,00</b>	<b>11.859.051.009,00</b>	<b>(787.501.991,00)</b>	<b>93,77</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.671.235.000,00	1.601.179.200,00	(70.055.800,00)	95,81
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.840.318.000,00	10.124.336.337,00	(715.981.663,00)	93,40
5.2.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	133.535.472,00	(1.464.528,00)	98,92
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(21.024.447.323,00)</b>	<b>(19.396.319.849,00)</b>	<b>1.628.127.474,00</b>	<b>92,26</b>

Yogyakarta, 31 Desember 2018  
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
 PERDAGANGAN DIY



Drs. TRI SAKTIYANA, M.Si  
 NIP. 19660219 199303 1 005

## Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

<b>PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>					
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>					
<b>SKPD : 2.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>					
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019</b>					
					Halaman : 1
Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>180.400.000,00</b>	<b>205.816.692,00</b>	<b>25.416.692,00</b>	<b>114,09</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>180.400.000,00</b>	<b>205.816.692,00</b>	<b>25.416.692,00</b>	<b>114,09</b>
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	165.000.000,00	190.416.692,00	25.416.692,00	115,40
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>22.480.135.936,00</b>	<b>20.959.483.012,00</b>	<b>(1.520.652.924,00)</b>	<b>93,24</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>7.919.406.346,00</b>	<b>7.452.117.454,00</b>	<b>(467.288.892,00)</b>	<b>94,10</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.919.406.346,00	7.452.117.454,00	(467.288.892,00)	94,10
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>14.560.729.590,00</b>	<b>13.507.365.558,00</b>	<b>(1.053.364.032,00)</b>	<b>92,77</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.126.066.010,00	2.046.086.500,00	(79.979.510,00)	96,24
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.173.952.900,00	11.214.439.058,00	(959.513.842,00)	92,12
5.2.3.	Belanja Modal	260.710.680,00	246.840.000,00	(13.870.680,00)	94,68
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(22.299.735.936,00)</b>	<b>(20.753.666.320,00)</b>	<b>1.546.069.616,00</b>	<b>93,07</b>

Yogyakarta,  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN

Ir. ARIS RIYANTA, M.Si  
19620324 198903 1 006


## Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

<b>PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>					
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>					
<b>SKPD : 2.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>					
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020</b>					
Halaman : 1					
Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	<b>Pendapatan</b>	182.200.000,00	217.581.035,00	35.381.035,00	119,42
4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	182.200.000,00	217.581.035,00	35.381.035,00	119,42
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	182.200.000,00	217.581.035,00	35.381.035,00	119,42
5.	<b>BELANJA</b>	18.297.649.150,00	16.732.680.510,00	(1.564.968.640,00)	91,45
5.1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	8.390.580.120,00	7.815.281.669,00	(575.298.451,00)	93,14
5.1.1.	Belanja Pegawai	8.390.580.120,00	7.815.281.669,00	(575.298.451,00)	93,14
5.2.	<b>Belanja Langsung</b>	9.907.069.030,00	8.917.398.841,00	(989.670.189,00)	90,01
5.2.1.	Belanja Pegawai	463.580.000,00	451.435.000,00	(12.145.000,00)	97,38
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.338.654.280,00	8.363.554.091,00	(975.100.189,00)	89,56
5.2.3.	Belanja Modal	104.834.750,00	102.409.750,00	(2.425.000,00)	97,69
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(18.115.449.150,00)</b>	<b>(16.515.099.475,00)</b>	<b>1.600.349.675,00</b>	<b>91,17</b>

Yogyakarta, 31 Desember 2020  
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
 PERDAGANGAN

Ir. ARIS RIYANTA, M.Si  
 19620324 198903 1 006

## Lampiran 5 Permohonan Ijin Penelitian

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>	
	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA</b>	
	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b>	
	Alamat : JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283	
	Telepon : (0274) 487276, 486255, Faximile : (0274) 486255	
	Email : febi@upnyk.ac.id - Laman : <a href="http://ekonomi.upnyk.ac.id">http://ekonomi.upnyk.ac.id</a>	

---

Nomor	: 39 /UN62.14/AKD.5/II/2022	Yogyakarta, 9 Februari 2022
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Permohonan Ijin Penelitian</u>	

Yth.  
**Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY**  
Jl. Kusumanegara No.9 Yogyakarta  
Di  
Yogyakarta.

Dengan Hormat,  
Sesuai dengan kurikulum Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta tentang kewajiban penulisan Skripsi bagi Mahasiswa yang menempuh Program Sarjana (S1).


Melalui surat ini mohon diijinkan mahasiswa kami :

Nama	: <b>Tugiyono Sanyoto</b>
No Mhs	: 142180236
No. Telp/HP	: 081227210092
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Untuk dapat memperoleh data/keterangan dan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna penyusunan Skripsi dengan judul :  
*Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-2020;*

Keterangan : a. Data yang diperoleh hanya untuk tulisan ilmiah  
b. Lama mencari data ± 2 (bulan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DR. Sri Suharsih, M.Si  
NIPPPK: 196912192021212008





